

19. Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) Provinsi

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
1	Rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangannya	DBH Kehutanan, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk rnebiayai kegiatan yang meliputi:								
	a.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL). Rencana Pembangunan Hutan Kota	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
	b.	Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL yang menjadi kewenangannya	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
	c.	Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk kegiatan:								
		1). Pembangunan Hutan Hak;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		2). Penghijauan lingkungan;	Ha		3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		3). Pembangunan Hutan kota;	Ha		3	28	03	1.04	0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
		4). Penanaman mangrove, gambut dan hutan pantai diluar Kawasan	Ha		3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
					2	11	03	1.03	0007	Pelaksanaan rehabilitasi
					3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
					3	28	03	1.04	0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		5). Penerapan teknik konservasi tanah dan air termasuk pada ekosistem mangrove dan gambut.	Ha		3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
					3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan
					3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug
				3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		d. Pemeliharaan tanaman	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
		e. Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
					3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2
		f. Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi lahan	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
		g. Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 dan PP.26 Tahun 2020	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
2	Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangannya	a. Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya								
		1). penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah Daerah bertindak sebagai pemegang Persetujuan Kawasan Hutan (P2KH)	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
					3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
		2). budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU.23 tentang Pemerintah Daerah);	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.06	0006	Fasilitas BPBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar
		3). Pemeliharaan tanaman;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
		4). Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
					3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		5). Kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PP Nomor 26 Tahun 2020	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		a) Prakondisi;			3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		b) Pengembangan Perbenihan			3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		c) Pengembangan Teknologi			3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		d) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		e) Penanaman dan Perlindungan Tanaman; dan/atau			3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		f) Pengembangan Kelembagaan;			3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		b. Rehabilitasi hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi penanaman oleh pemegang izin Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai renvana kegiatan Perhutanan Sosial	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		c. Rehabilitasi hutan dan lahan di taman Hutan raya yang terdiri atas:								
		1). Penghijauan;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		2). Reboisasi;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		3). Pemeliharaan tanaman;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
		4). Pengayaan tanaman;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		5). Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan
					3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug
					3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan
					3	28	03	1.04	0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
					3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan
					3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug
					3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan
		6). Penanaman pohon kanan kiri sungai; dan	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
		7). Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		8). Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
					3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2
		9). Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PP Nomor 26 Tahun 2020	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		d. Rehabilitasi hutan dan reklamasi di areal Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dalam hal Pengelola KHDTK melakukan kerja sama pengelolaan KHDTK dengan Pemerintah Daerah Provinsi	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	3.11	0001	Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya
					3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
		e. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai								

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						
1	2	3	4	5	6						
		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, melalui :									
		1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	
		2) Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	
		3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	
		4) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Lembaga	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	
3	Pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan	a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Tahura)									
		1. Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0016	Penataan kawasan Tahura Provinsi	
		2). Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Locket, Papan Informasi, Toilet)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	
		3). Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura	Unit KK	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	
		4). Operasional Sararana dan Prasarana Taman Hutan Raya Provinsi			3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		b. Pengelolaan sampah di dalam dan sekitar kawasan Tahura yang timbul dari pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam melalui pengelolaan Kawasan TAHURA:								pengelolaan sampah hanya dilakukan oleh Kabupaten/kota (poin 1 sd 5)
		1). Penyusunan master plan pengelolaan sampah di Tahura	Dokumen	Pemerintah Masyarakat						
		2). Pengurangan sampah	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat						
		3). Penanganan sampah	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat						
		4). Penyediaan dan pembangunan Saprass Persampahan	Unit	Pemerintah Masyarakat						
		5). Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Bank Sampah dalam mendukung ekonomi sirkular dari pengelolaan sampah	Kegiatan/Unit	Pemerintah Masyarakat						
		6). Sosialisasi kepada pengunjung wisata dan masyarakat sekitar Tahura	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
		c. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Dokumen/ Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
					3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		d. Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Dokumen/ Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0016	Penataan kawasan Tahura Provinsi
					3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						
1	2	3	4	5	6						
	e.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHIH) melalui sistem pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
					3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
					3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
	f.	Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan, Hasil Hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan	Pemanfaatan Jumlah		3	28	03	1.06	0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
					3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
	g.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
					3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
	h.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.06	0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	
						3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		i. Pengawasan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHIH)	jumlah pemanfaatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		j. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
					3	28	03	1.06	0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
					3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		k. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
					3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		l. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
					3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		m. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas	Dokumen	1. Pemerintah	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	2. Masyarakat	3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		n Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik								
		1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan tidak termasuk Appendix CITES melalui pengawasan, patroli dan sosialisasi	Entitas	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
		2) Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KSA/KPA melalui invent potensi kehati spesies dan genetik	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
		3) Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		5) Pengembangan sistem data base kehati daerah provinsi (Balai Kliring)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	1.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati
		6) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati	Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		7) Pembinaan dan edukasi kepada Kabupaten/kota terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan hutan dan kawasan Konservasi	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		8) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial :	Unit KEE							
		a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat		1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
		b) Penyediaan Sarpras Pengelolaan		1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
		c) Pendidikan/Penelitian dan Penyadartahuan		1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
		d) Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati		1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		e) Pemulihan Ekosistem/ Pembinaan Habitat		1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	Fasilitasi penyiapan akses legal PS dalam bentuk Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat	Jumlah Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat						
		1) Operasional POKJA PPS	Jumlah Kegiatan	POKJA PPS Provinsi	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
		2) Sosialisasi tingkat tapak	Jumlah lokasi	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
		3) Pendampingan dan Fasilitasi Permohonan persetujuan pengelolaan PS	Jumlah Calon Lokasi PS	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
		4) Pendampingan dan Fasilitasi Permohonan Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan	Jumlah Pemegang Persetujuan Pengelolaan PS	Masyarakat yang berkonflik	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
		5) Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Lokasi Konflik	Masyarakat yang berkonflik	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
		6). Fasilitasi Penanganan konflik tenurial dan hutan adat;	Jumlah Lokasi Konflik	Masyarakat yang berkonflik	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
		7). Fasilitasi Penyusunan	Jumlah		3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						
1	2	3	4	5	6						
		Rancangan Peraturan Daerah MHA, dan/atau	Jumlah Komunitas MHA	Komunitas MHA	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
		8) Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan lokal	Dokumen	Komunitas MHA dan Pengampu kearifan lokal	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
		b. Fasilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)									
		1) Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial	Jumlah Dokumen	KUPS	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
		2) Pelatihan pengembangan usaha/kerjasama usaha	Jumlah KUPS	KUPS	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		3) Pelatihan pengembangan kewirausahaan	Jumlah KUPS	KUPS	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		4) Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial	Jumlah KUPS	KUPS	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		5) Pembangunan agroforestry	Jumlah KUPS	KUPS	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		6) Pemberian bantuan alat ekonomi produktif	Paket	KUPS	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		7) Pendampingan kelompok Perhutanan Sosial									
		a) Sarpras pendukung pelaksanaan pendampingan	Unit	Pemerintah & KUPS	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			
			3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			
b) Operasional Pendamping	Jumlah Pendamping	KUPS	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan			
			3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			
			3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			
			3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan			
			3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan			

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		c). Peningkatan kapasitas Pendamping PS	Jumlah Pendamping	KUPS	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
		8) Pengawasan dan Pengendalian PS								
		a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok PS	Kegiatan	Pemerintah & KUPS	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		b) Sarpras pendukung pelaksanaan Monev	Unit	Pemerintah & KUPS	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		c. Pemberian Akses Kelola Masyarakat melalui Kemitraan Konservasi (Hektar)								
		1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Kemitraan Konservasi	Hektar	Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		2) Pembentukan/Penguatan Kelembagaan	Desa/Kelompok	Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		3) Perjanjian Kerja Sama	Perjanjian	Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		4) Pelatihan Masyarakat	Kelompok	Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		d Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Konservasi								
		1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Desa/Kelompok	Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		2) Pembentukan Kelembagaan	Kelompok	Masyarakat	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
		3) Pelatihan Masyarakat	Kelompok	Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		4) Pemberian Bantuan Usaha	Unit	Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		e) Dukungan fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial di kabupaten/kota dalam satu provinsi melalui :								
		1) Fasilitasi penguatan sinergitas dan kolaborasi multipihak dalam pengembangan IAD di wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
		2) Fasilitasi penyusunan dan pengesahan dokumen IAD	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
		3) Dukungan verifikasi teknis dalam proses pemberian persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;	Dokumen / Berita Acara Verifikasi Teknis	Pemerintah Masyarakat	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
		4) Fasilitasi pengembangan usaha, meliputi :								
		a)Fasilitasi penyusunan rencana kelola PS/rencana kerja tahunan dan pembentukan KUPS	Jumlah KPS	Pemerintah Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		b)Fasilitasi terbentuknya kelompok sadar wisata	Jumlah Kelompok	Pemerintah Masyarakat	3	26	02	1.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi
		c)Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai koperasi	Jumlah KPS	Pemerintah Masyarakat	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		d)Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai UMKM	Jumlah KPS	Pemerintah Masyarakat	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
		e)Fasilitasi pelatihan kelautan dan perikanan	KUPS Pembudidayaan ikan	Pemerintah Masyarakat	3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		f)Fasilitasi penguatan kerja sama usaha KPS dengan BUMDes/ BUMDesma	Jumlah BUMDEs/ BUMDesma	Pemerintah Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		g)Penyusunan panduan avokasi dan kerja sama desa untuk Perhutanan Sosial	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	2	13	04	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
					2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
		h)Sosialisasi regulasi pemanfaatan dana desa untuk Perhutanan Sosial	Dokumen	Pemerintah Masyarakat	2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		i)Fasilitasi pendampingan untuk peningkatan usaha (KUR)	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	2	17	08	1.01	0003	Pengembangan Usaha Kecil
		j)Fasilitasi sertifikasi produk hasil hutan dari PS	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	2	17	07	1.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
		k)Fasilitasi standarisasi produk hasil hutan dari PS	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	2	17	07	1.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
		l)Fasilitasi pemasaran akses pasar / promosi KUPS melalui LKPP, e-commerce, pameran, promosi, dll	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
		m). Bimbingan teknis pengembangan ekowisata	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		n)Bimbingan teknis pengembangan usaha pembudidayaan ikan	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
		o)Fasilitasi pembangunan rumah kemas	Unit	Pemerintah Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		p)Fasilitasi bantuan bibit tanaman	Batang	Pemerintah Masyarakat	3	27	02	1.02	0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
				masyarakat	3	28	03	1.09	0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan
		q)Fasilitasi pengembangan desa wisata	Desa	Pemerintah Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		5) Penyediaan sarana dan prasarana								
		a)Fasilitasi bantuan sarana prasana produksi pertanian	Unit	Pemerintah Masyarakat	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
					3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					3	27	03	1.01	0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
		b)Fasilitasi bantuan sarana prasana produksi perikanan	Unit	Pemerintah Masyarakat	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
		c)Fasilitasi pembangunan akses jalan ke lokasi PS	Unit	Pemerintah Masyarakat	3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
		d)Fasilitasi sarana prasarana wisata KUPS	Unit	Pemerintah Masyarakat	3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		e)Fasilitasi peningkatan sarana prasarana akses telekomunikasi KUPS	Unit	Pemerintah Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		6) Pendampingan								
		a)Operasional pendamping	Orang	Pemerintah Masyarakat						Dapat digunakan oleh SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan IAD
		b)Penyediaan sarana dan prasana pendamping	Unit	Pemerintah Masyarakat	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		c)Fasilitasi pengembangan kompetensi pendamping	Orang	Pemerintah Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
		7) Pelatihan								
		a)Fasilitasi peningkatan kapasitas pendamping melalui pelatihan	Pendamping	Pemerintah Masyarakat	3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
		b)Penyelenggaraan sekolah lapang bagi pendamping	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
					3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
		c)Fasilitasi penguatan kapasitas KPS dalam pemanfaatan teknologi tepat guna oleh Perguruan Tinggi	Jumlah KPS	Pemerintah Masyarakat	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		8) penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan IAD berbasis PS	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
					5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
5	Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan	a. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan								
		1) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan perlindungan hutan:		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.						
		a) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin (diluar PIAPS, TORA, HPK, dan hutan alam gambut) secara partisipatif.	Lokasi	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan
		b) Pengembangan kelembagaan tingkat tapak (KPH) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan melalui penguatan Resort Based Management (RBM).	Lembaga	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		2) Penguatan kelembagaan KPH dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan (Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery):		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.						
		a) Fasilitasi Kegiatan Bimtek, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk Mendukung Kegiatan Hutsos.	Kegiatan	Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi		Seluruh KPH di 33 Pemerintah	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						
1	2	3	4	5	6						
		Masyarakat di Wilayah KPH. C) Pemasaran dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH		Provinsi.	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Penanganan Pascapanen dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian operasional KPH			Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.						
		a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM	Orang		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
						3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
						3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
						3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
						3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
		b) Operasional KPH	Bulan		Seluruh KPH di 33 Pemerintah Provinsi.	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
						3	28	03	1.01	0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH
		4) Pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk Optimalisasi PNBP dalam bentuk pembinaan dan evaluasi atas PNBP (pengawasan, pengendalian dan rekonsiliasi) Perizinan Berusaha.	Kegiatan		Dinas yang membidangi LHK di 33 Pemerintah Provinsi.	3	28	03	1.06	0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		b. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan:									

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024									
1	2	3	4	5	6									
		Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan:		Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.										
		1) Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan.	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				
		2) Fasilitasi pembangunan hutan pola agroforestry (Sylvopastura maupun Silvofishery).	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial				
		3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi masyarakat yang memiliki akses legal dalam pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan).	Lembaga	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		5) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan sosial.	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada 33 Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		c. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil hutan:		UMKM/ Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi						
		1) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi Pengolahan hasil hutan skala kecil/UMKM.	Lambaga	UMKM/ Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		2) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM.	Kegiatan	UMKM/ Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
					3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		d. Penyusunan RPHJP dan RPHJpd (Penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJpd yang sudah disahkan)	Jumlah Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
					3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
					3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
		e. Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan kebakaran hutan	Laporan pengamanan hutan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
					3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		f. Penyusunan data potensi SDH	Data potensi SDH	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
					3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
		g. Penataan batas blok dan petak (penataan batas dan tanda-tanda batas yang terpasang di lapangan)	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
		h. Monev Pemanfaatan Hutan	Laporan dan rekomendasi tindak lanjut	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.03	0013	koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi
					3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung
		i. Monev Penggunaan kawasan hutan	Laporan dan rekomendasi tindak lanjut	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.08	0003	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan KHDTK
					3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi
3	28				03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung		
j. Penyusunan rencana detail pemanfaatan hutan seperti Rencana Bisnis atau Desain Tapak	Rencana bisnis, Desain Tapak	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		k. Pengadaan Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan	Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		l. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
		m. Pembangunan resort	Jumlah resort	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
		n. Fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0002	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor
		o. Fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
		p. Fasilitasi penataan Kawasan Hu	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi
					3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						
1	2	3	4	5	6						
		Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
		r	Fasilitasi ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang dilaksanakan KPH	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
						3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial
						3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
6	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a.	Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pameran)	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		b.	Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga	Unit/Buku/	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		c.	Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya	Unit/Lembar/	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		d.	Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu	Unit/Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		e. Pendampingan (Pembentukan/ Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Lokasi/Kelompok	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		g. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar	Km	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		h. Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kg/Ton/Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi	Kg/Ton/Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi	Kg/Ton/Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi	Kg/Ton/Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		i. Pembuatan Sekat Kanal/ Embung/ Kantong Air	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		j. Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		k. Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhutla	Unit/Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		l. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Desa	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		11) Perawatan Pribadi (M.D)	Unit		X	XX	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		12) Perlengkapan Regu	Unit		X	XX	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
					X	XX	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Posko	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
					1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		p. Pelaksanaan Pemadaman Darat	Hari Operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
					1	05	03	1.03	0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		q. Penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan		Pemerintah						
		1) Pengawasan areal bekas terbakar	Lokasi/Hektar		1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi
		2) Inventarisasi luas karhutla	Lokasi/Hektar							
		3) Penaksiran kerugian	Lokasi/Hektar							
		4) Koordinasi penanganan pasca karhutla	Kegiatan/lokasi							
		r. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura)								
		1) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Orang		3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
		2) Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama Masyarakat Peduli Api	Hektar/Spot		3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
					3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
		3) Pemadaman Kebakaran Hutan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		4) Penyadartahuan Masyarakat	Desa/Kelompok		3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
		5) Penyediaan Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan	Unit		X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						
1	2	3	4	5	6						
		s. Pembuatan peta rawan bencana dan aplikasi system informasi potensi ancaman Karhutla	Unit/Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
		t. Pendirian posko Karhutla	Posko	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
7	Perindungan dan pengamanan hutan	a. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
		b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
		c. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
		d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
		e. Penjagaan di tempat-tempat tertentu	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
		f. Patroli pengamanan	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
		g. Operasi Pengamanan Hutan Lindung dan Produksi									
		1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi	Jumlah operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
		2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan Produksi illegal.	Jumlah operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
		h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan : Rakor Pengamanan Hutan tingkat Provinsi	Kegiatan	Pemerintah	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
		i. Penyegaran/Pembinaan Polisi Kehutanan	Kegiatan	Polisi Kehutanan	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
						3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
				3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		
				3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
	j. Penyegaran/Pembinaan PPNS	Kegiatan	PPNS	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
		k. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan : Apel Siaga Pengamanan Hutan	Kegiatan	Pemerintah	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
		l. Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam Polhut, Senjata Api dan Mobil Patroli)	Polisi Kehutanan	Polisi Kehutanan	X	XX	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		m. Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tahura)		1. Pemerintah 2. Masyarakat						
		1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	orang		3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
		2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	kegiatan		3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
		3) Penyediaan Saprasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	unit		3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
		n. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya								
		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, meliputi :								
		1) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Dokumen/Lokus Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0001	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
		2) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0002	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst
		3) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Dokumen/Lokus kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah
		4) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Ha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
8	Perbenihan tanaman hutan	a. Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas) meliputi:	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat						
		1) Pembuatan batas areal sumber benih;			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		2) Evaluasi tegakan (pengamatan, pengukuran dan analisis data dan seleksi);			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging));			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		4) Pemangkasan (pemangkasan cabang, pemangkasan tajuk dan pemangkasan pucuk (<i>top pruning</i>))			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		5) Pemeliharaan (pembersihan tumbuhan bawah, pemberian mulsa, pemupukan);			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian hama dan penyakit; pengamanan dari pencurian kayu, pengembalaan, gangguan pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas famili dan papan nama; pencegahan dan pengendalian kebakaran); dan/atau			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		7) Pemanfaatan/pengunduhan benih.			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		b. Pembangunan sumber benih Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas), melalui:			Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat				

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		1) Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas;			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		2) Pengumpulan benih dari individu/ family plus;			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		3) Pembuatan rancangan penanaman;			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		4) Pembibitan;			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		5) Pemapangan			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		6) Penanaman dan pemeliharaan;			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		7) Evaluasi tegakan;			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging) ; dan/atau			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan
		9) Penetapan sumber benih.			3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						
1	2	3	4	5	6						
		c. Pembuatan/pengadaan bibit:		1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat							
		1) Pembangunan persemaian;	Unit atau Batang		3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	
		2) Pengadaan bibit (tender);	Unit atau Batang		3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	
		3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR); dan/atau	Unit atau Batang		3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	
		4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)			3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
					3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	
					3	28	03	1.01	0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	
		d. Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan, meliputi:			1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH						
		1) Sertifikasi sumber benih;	Kali	3		28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	
		2) Sertifikasi mutu benih; dan/atau	Kali	3		28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih	
		3) Sertifikasi mutu bibit.	Kali	3		28	03	1.09	0004	Sertifikasi Mutu Bibit	
		e. Pembinaan perbenihan tanaman hutan, dapat berupa:			1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Pelaku Usaha PTH						
		1) Bimbingan teknis;	Kali atau Orang	3		28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	
		2) Pemantauan dan evaluasi;	Kali atau Orang	3		28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	
		3) Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau	Kali atau Orang	3		28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	
		4) Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan tanaman hutan, melalui:	Kali atau Orang								
		a) Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih;	Kali atau Orang	3		28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
				3		28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
				3		28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
				3		28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						
1	2	3	4	5	6						
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
		b) Pelatihan Penilaian Sumber Benih;	Kali atau Orang		3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
				3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
				3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		
				3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
				3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
		c) Pelatihan Pengujian Mutu Benih ;	Kali atau Orang		3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
				3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
				3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		
				3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		
				3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan		

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						
1	2	3	4	5	6						
		d) Pelatihan Penilaian Mutu Bibit;	Kali atau Orang		3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
		e) Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit	Kali atau Orang		3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
9	Penyuluhan kehutanan	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan : Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK)	Jumlah Lokasi	Lokasi UPPK	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		b. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Fasilitasi Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Poslulhutdes)	Jumlah Lokasi	1. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 2. KTH 3. Masyarakat	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
		c. Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan: 1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan; 2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan; 3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL; dan/atau 4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan. 5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh	Orang	1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
					3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
					3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
					3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
		d. Pendampingan kelompok tani hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL	Kelompok	KTH	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
		e. Peningkatan kapasitas usaha KTH dan Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Hasil KTH			3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
		f. Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluh	Unit	1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3. Masyarakat	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
		g. Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk:								

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						
1	2	3	4	5	6						
		1) Metode penyuluhan:	Jumlah Lokasi	1. KTH	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
		a) Lomba wana lestari;		2. Penyuluh Kehutanan	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
		b) Termu teknis KTH;		3. Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
		c) Sekolah lapang; dan/atau			3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
		d) Workshop, dll.			3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
		2) Materi Penyuluhan:									
		a) Media cetak (buku, majalah, leaflet, booklet, bulletin, modul, dll); dan/atau									
		b) Media elektronik (radio, TV dan online sistem)									
		c) Sekolah Lapang Tematik Unggulan (RHL/ HHBK/ Perhutanan Sosial/ pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan)									
		h. Penyusunan Program (tingkat UPTD dan Provinsi) meliputi:		Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat						
		1) Identifikasi potensi wilayah menggunakan metode dan instrument <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> , <i>Impact Point</i> , <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya, dan/atau				3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
						3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
						3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
						3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
						3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		2) Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) kehutanan.			3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
	i.	Monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
	j.	Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot		1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024						
1	2	3	4	5	6						
		k. Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang terdiri atas:	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat							
		1) Sarana perlengkapan perorangan;			X	XX	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		2) Sarana dan prasarana pendukung utama; dan/atau			X	XX	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		3) Sarana pendukung lainnya.			X	XX	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10	Program strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah	a. Penguatan Perekonomian Daerah yang meliputi :									
		1) Penyusunan dokumen <i>Integrated Area Development</i> oleh bupati/walikota									
		2) penyediaan sarana dan prasarana			X	XX	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		3) pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;	UMKM	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	17	07	1.01	0001		Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
		4) dukungan standardisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0006		Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
					3	28	05	1.01	0008		Penyiapan Perhutanan Sosial
					2	17	07	1.01	0011		Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		5) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		6) pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
					2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja
		7) pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan; dan/atau	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
					3	28	05	1.01	0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		8) pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan.	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	26	02	1.01	0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
		9) penelitian dan pengembangan			5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
					5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
	b.	pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota kepada desa	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
						5	02	02	1.05	0008
	c.	Dukungan Kesekretariatan penyusunan, pembinaan, dan/atau pengawasan DBH DR Provinsi	Kegiatan/Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	d	Bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota			5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	e.	pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja dan/atau kelompok sektor kehutanan dalam rangka jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
		pengelolaan kebersihan dalam		1. Pemerintah	2	11	11	1.01	0011	Pengelolaan sampah Regional

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					
1	2	3	4	5	6					
		f. rangka pelestarian hutan dalam dan luar kawasan		1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	11	1.01	0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		g. pengelolaan jalan sekitar kawasan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan sesuai dengan kewenangannya	Km	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan
		<i>Folu net sink 2030 subnational</i> dalam rangka			1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan
		1) Penyusunan Rencana Kerja <i>folu Net Sink 2030</i>	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
		h. 2) monitoring dan evaluasi folu Net Sink 2030	Kegiatan/Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
		3) Pengendalian dan pengawasan <i>folu Net Sink 2030</i>	Kegiatan/Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA